

## DAFTAR PUSTAKA

- Destriyatna,Gilang., Nengah Sudjana., dan Dwiatmanto. (2014). Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan. *Jurnal Perpajakan*, 6 (1), hal 1-4.
- Erwis, Nana Adriana. (2012). *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Makassar Selatan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar (dipublikasikan).
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- <http://kemenkeu.go.id/Publikasi/laporan-keuangan-kementerian-keuangan-ta-2013>. diakses pada tanggal 26 maret 2015.
- <https://tanyapajak1.wordpress.com/2014/03/11/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa/>. diakses pada tanggal 31 maret 2015.
- Ilyas, Wirawan B., Burton, Richard. (2007). *Hukum Pajak*. edisi ketiga. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. (2010). *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. (2010), *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nazir,Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta Granit, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK 03/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK 01/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor :Per-48/PJ./2007 tanggal 5 Maret 2007

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.01/2012  
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Rowan Jones, Maurice Pendlebury. (2000). *Public Sector Accounting*. Financial Times Prentice Hall, England.

Samosir , Hotmian H . 2013. *Daluwarsa Penagihan Pajak (Tahun Pajak 2003 sd 2007)*. Diakses dari <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12609-daluwarsa- penagihan-pajak-tahun-pajak-2003-sd-2007>. Pada tanggal 31 maret 2015.

Suandy, Erly. (2005). *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat. Jakarta.

Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke- 17. Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (perubahan keempat) tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 angka 3 tentang pajak penghasilan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 22 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Edisi kedelapan. Buku satu. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.